

## **POTRET EKSTENSIF TUJUAN *GLOBAL CITIZENSHIP EDUCATION* (GCE) DI NORWEGIA**

**Muhamad Khoerudin<sup>1</sup>, Komarudin Sassi<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup> Institut Agama Islam Al-Qur'an Al-Ittifaqiah Indralaya (IAIQI) Indralaya

Indralaya Mulia, Kec. Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan

Email : <sup>1</sup>muhamadkhoerudin963@gmail.com , <sup>2</sup>sassikomarudin@yahoo.com

**Abstract:** This research aims to provide an extensive portrait of the objectives of global citizenship education (GCE) in Norway, which is increasingly important amid globalization challenges. The background of this study highlights the need for individuals to be sensitive to global issues such as climate change, social inequality, and international conflicts. The method used in this research is literature study, involving the collection and analysis of various written sources, including academic journals, government reports, and relevant educational policy documents. The findings indicate that Norway has successfully integrated global values into its educational curriculum through an interdisciplinary approach. However, challenges such as insufficient teacher training, resource limitations, and the need to balance global values with local identities still need to be addressed to ensure the success of global citizenship education in the future.

**Keywords:** *Portrait, Global Citizenship Education, Globalization Challenges, Norwegia.*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk memberikan potret ekstensif tujuan pendidikan kewarganegaraan global (PKG) di Norwegia, yang semakin penting di tengah tantangan globalisasi. Latar belakang penelitian ini menyoroti kebutuhan akan individu yang peka terhadap isu-isu global, seperti perubahan iklim, ketidaksetaraan sosial, dan konflik internasional. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur, dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber tertulis, termasuk jurnal akademik, laporan pemerintah, dan dokumen kebijakan pendidikan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Norwegia telah berhasil mengintegrasikan nilai-nilai global ke dalam kurikulum pendidikannya melalui pendekatan lintas disiplin. Namun, tantangan seperti pelatihan guru yang masih kurang, keterbatasan sumber daya, dan perlunya keseimbangan antara nilai-nilai global dan identitas lokal masih perlu diatasi untuk memastikan keberhasilan pendidikan kewarganegaraan global di masa depan.

**Kata Kunci :** Potret, Pendidikan Kewarganegaraan Global, , Tantangan Globalisasi, Norwegia.

**G**lobalisasi merupakan suatu proses (atau serangkaian proses) yang mewujudkan transformasi dalam organisasi spasial hubungan dan transaksi

sosial – dinilai dari segi luasnya, intensitasnya, kecepatannya, dan dampaknya – yang menghasilkan arus dan jaringan aktivitas, interaksi, dan

penggunaan kekuasaan lintas benua atau antar wilayah (Urry, 1999). Globalisasi tidak hanya memberikan perkembangan pada sektor teknologi dan ekonomi saja, tetapi juga memperluas jangkauan isu-isu yang terus berkembang sebagai permasalahan global, seperti perubahan iklim, ketidaksetaraan sosial, hak asasi manusia, dan perdamaian dunia, termasuk dalam bidang pendidikan kewarganegaraan global (Oxley, L., & Morris, 2013).

Dalam konteks global ini, pendidikan tidak lagi hanya berfungsi sebagai sarana untuk mencapai tujuan-tujuan lokal, tetapi juga untuk mempersiapkan individu agar mampu berperan dalam masyarakat global. Konsepsi pendidikan kewarganegaraan global mengacu pada rasa memiliki terhadap komunitas yang lebih luas dan kemanusiaan bersama. Hal ini menekankan saling ketergantungan dan keterhubungan politik, ekonomi, sosial, dan budaya antara lokal, nasional, dan global (“Glob. Citizsh. Educ. Top. Learn. Object.,” 2015).

Pendidikan kewarganegaraan global (*Global Citizenship Education*) hadir sebagai salah satu respons terhadap tantangan zaman ini, dengan mengedepankan pembentukan individu yang memiliki kesadaran global dan komitmen untuk menciptakan dunia yang lebih inklusif dan berkeadilan (Schulz et

al., 2022). Pendidikan harus dirasakan oleh warga negara secara global, tanpa terkecuali dari kalangan orang biasa maupun pejabat pemerintahan. Hal tersebut menjadi sesuatu yang wajib diupayakan oleh pemerintah dalam suatu negara. Meskipun tidak selalu ditetapkan sebagai bidang studi khusus, pendidikan kewarganegaraan cenderung dimasukkan dalam kurikulum nasional sebagai bidang pembelajaran yang bertujuan untuk mendukung pengetahuan dan pemahaman generasi muda tentang prinsip dan lembaga masyarakat, penilaian kritis mereka terhadap peran dan tanggung jawab warga negara, dan pembelajaran mereka tentang cara memengaruhi kebijakan dan praktik melalui proses demokrasi (Schulz et al., 2022).

Pemerintah memiliki peran krusial dalam mengupayakan pendidikan kewarganegaraan yang dapat diakses oleh semua warga negara. Hal ini meliputi penyediaan sumber daya, pelatihan bagi para pendidik, dan pengembangan kurikulum yang memadai untuk mendukung implementasi pendidikan kewarganegaraan. Meskipun pendidikan kewarganegaraan tidak selalu ditetapkan sebagai bidang studi khusus, prinsip-prinsipnya biasanya diintegrasikan ke dalam kurikulum nasional sebagai bagian dari pembelajaran yang lebih luas. Kurikulum ini bertujuan untuk

memperkuat pengetahuan dan pemahaman generasi muda mengenai prinsip-prinsip dasar masyarakat, serta peran dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara di era global (Primary, n.d.).

Dengan demikian, pendidikan kewarganegaraan berfungsi sebagai landasan untuk membentuk generasi yang tidak hanya terinformasi tetapi juga aktif dalam berpartisipasi dalam masyarakat.

Lebih jauh dari itu, pendidikan kewarganegaraan juga memfasilitasi siswa dalam mengembangkan kemampuan untuk melakukan penilaian kritis terhadap kondisi sosial dan politik di sekeliling mereka (Grete Broderstad, 2022). Mereka diajarkan cara untuk memengaruhi kebijakan dan praktik melalui proses demokrasi, yang mencakup keterampilan seperti diskusi, negosiasi, dan advokasi. Melalui pengalaman belajar yang praktis, siswa dapat memahami bagaimana suara mereka dapat berkontribusi pada perubahan sosial dan mempromosikan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan. Dengan pendekatan ini, pendidikan kewarganegaraan tidak hanya membekali siswa dengan pengetahuan teoritis, tetapi juga memberikan mereka alat untuk menjadi agen perubahan yang berdaya di komunitas mereka dan di panggung global. Dalam konteks ini, pendidikan kewarganegaraan global tidak hanya menjadi tanggung jawab individu, tetapi

juga merupakan komitmen kolektif untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik dan lebih adil (Urry, 1999).

Pendidikan global merupakan pendidikan yang memungkinkan orang untuk berefleksi secara kritis tentang dunia dan lingkungan sekitar ia tinggal, untuk membuka mata, hati, dan pikiran mereka terhadap realitas dunia baik di tingkat lokal maupun tingkat global (Education, 2023). Pendidikan ini memberdayakan orang untuk memahami, membayangkan, berharap, dan bertindak untuk mewujudkan dunia yang berkeadilan sosial dan iklim, perdamaian, solidaritas, kesetaraan dan keadilan, keberlanjutan dunia, dan pemahaman internasional. Pendidikan ini melibatkan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan keberagaman, inklusivitas, dan kehidupan yang layak bagi semua untuk masa sekarang dan di masa depan (Lopes Sampaio Francisco Jaguaribe et al., 2022). Pendidikan global adalah upaya pendidikan yang mendorong pemikiran kritis tentang dunia dan lingkungan, serta mempromosikan keadilan sosial dan perdamaian (Sassi & Azzahra, 2024). Ini menekankan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Kebijakan pendidikan mencerminkan dan mempromosikan nilai-nilai inti keadilan dan hak asasi manusia yang ingin dijunjung tinggi oleh masyarakat, dengan sekolah sebagai salah

satu lembaga masyarakat yang paling penting (Grete Broderstad, 2022).

Dari beberapa pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan kewarganegaraan global bertujuan untuk menjadi lebih transformatif dalam membangun pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai dan sikap yang dibutuhkan peserta didik agar mampu berkontribusi pada dunia yang lebih inklusif, adil dan damai. Pendidikan kewarganegaraan global mengambil ‘*pendekatan multifaset*’ (Rachmahana, 2008). Dengan menggunakan konsep dan metodologi yang telah diterapkan di bidang lain, termasuk pendidikan hak asasi manusia, pendidikan perdamaian, pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan dan pendidikan untuk pemahaman internasional (“Glob. Citizsh. Educ. Top. Learn. Object.”, 2015). Pendidikan kewarganegaraan global berupaya untuk menciptakan manusia yang mampu mengintegrasikan kemampuan intelektual dan ketrampilan yang ada dalam diri manusia tersebut yang terbentuk dari proses pendidikan tersebut akan mampu menciptakan kondisi sosial, ekonomi, perdamaian dan keadaan lainnya menjadi sangat seimbang untuk keberlanjutan dunia yang semakin maju dengan peradabannya. Pendidikan kewarganegaraan global bertujuan untuk menanamkan pemahaman yang lebih dalam tentang isu-isu global dan

mempromosikan nilai-nilai seperti perdamaian, toleransi, keberlanjutan, serta penghargaan terhadap keragaman budaya dan hak asasi manusia. Melalui pendidikan ini, diharapkan generasi muda dapat berpikir kritis tentang peran mereka dalam masyarakat global dan mampu berkontribusi dalam memecahkan masalah-masalah dunia.

Norwegia memprioritaskan hak-hak individu dalam sistem sosial dan pendidikannya, telah mengintegrasikan pendidikan kewarganegaraan global ke dalam kurikulumnya. Prinsip kesetaraan dalam pendidikan sangat melekat dalam masyarakat Norwegia. Pihak berwenang di setiap tingkatan berusaha menerapkan kesetaraan untuk semua warga negaranya (Klingstedt, 2003).

Norwegia dikenal sebagai salah satu negara dengan sistem pendidikan yang *progresif*. Negara tersebut sangat fokus pada kesetaraan, partisipasi aktif, dan keberlanjutan (Østerud & Selle, 2006). Negara ini memiliki sejarah panjang dalam menegakkan hak asasi manusia, mempromosikan perdamaian, serta mendukung kesetaraan *gender* dan keberagaman. Nilai-nilai tersebut sejalan dengan prinsip dasar pendidikan kewarganegaraan global. Oleh karena itu, implementasi pendidikan kewarganegaraan global di Norwegia tidak hanya dipandang sebagai pelengkap

kurikulum, tetapi sebagai bagian integral dari visi pendidikan nasional yang lebih besar. Di Norwegia, lembaga pemerintah, organisasi, serikat pekerja, lembaga, dan asosiasi terkait diberi kesempatan untuk menyatakan pendapat mereka tentang saran kebijakan dalam apa yang disebut dengar pendapat public (Hilt & Riese, 2022).

Sebagai negara dengan sejarah panjang dalam mempromosikan hak asasi manusia, perdamaian, dan kesetaraan, nilai-nilai tersebut sangat selaras dengan prinsip dasar pendidikan kewarganegaraan global (PKG). Norwegia selalu berusaha untuk menanamkan nilai-nilai tersebut dalam pendidikan, baik melalui kebijakan maupun praktik sehari-hari di sekolah-sekolah. Implementasi PKG di Norwegia tidak hanya dipandang sebagai upaya untuk memperkaya kurikulum, tetapi sebagai bagian integral dari visi pendidikan nasional yang lebih luas (Krumsvik, 2008). Pendidikan kewarganegaraan global diintegrasikan ke dalam berbagai mata pelajaran, seperti ilmu sosial, geografi, dan bahkan seni, untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang isu-isu global dan tanggung jawab setiap individu dalam masyarakat. Pendekatan lintas disiplin ini memastikan bahwa siswa tidak hanya mendapatkan pengetahuan teoretis, tetapi juga mengembangkan sikap dan keterampilan yang dibutuhkan untuk

menjadi warga global yang aktif dan bertanggung jawab.

Keterlibatan elemen masyarakat dalam pembuatan kebijakan pendidikan di Norwegia juga menjadi salah satu aspek yang sangat penting. Lembaga pemerintah, organisasi, serikat pekerja, serta berbagai asosiasi terkait diberi kesempatan untuk memberikan masukan mereka melalui proses yang dikenal sebagai dengar pendapat publik. Mekanisme ini memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam pengembangan kebijakan, termasuk kebijakan pendidikan kewarganegaraan (Urry, 1999).

Pendekatan partisipatif ini tidak hanya mencerminkan komitmen Norwegia terhadap demokrasi, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan pendidikan yang dihasilkan lebih inklusif dan mencerminkan kebutuhan serta harapan berbagai kelompok dalam masyarakat. Dengan demikian, kebijakan pendidikan di Norwegia tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga hasil kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan yang berkontribusi dalam mewujudkan visi pendidikan yang progresif dan berkelanjutan.

Pemerintah Norwegia memberikan hak kepada setiap anak untuk mendapatkan pendidikan di taman kanak-kanak sejak usia satu tahun, dan anak-anak mulai

bersekolah saat mereka berusia enam tahun. Pemerintah mendukung semua taman kanak-kanak secara finansial dan bertanggung jawab tertentu untuk menindaklanjuti pendidikan sesuai dengan Rencana Kerangka Kurikulum nasional (Braathe & Otterstad, 2014). Reformasi pendidikan terkini ini tercermin dalam kurikulum negara, dengan tiga nilai inti baru yang baru-baru ini diadopsi: Setiap bidang mata pelajaran di sekolah diharuskan untuk menawarkan konten yang mengembangkan ketiga nilai inti tersebut di seluruh masyarakat Norwegia (Elkorghli & Bagley, 2023).

Pemerintah Norwegia telah menyusun langkah-langkah yang sangat signifikan dengan memasukkan prinsip-prinsip kewarganegaraan global ke dalam sistem pendidikan nasionalnya. Ini terlihat dalam kebijakan pendidikan yang mendukung kesadaran lintas budaya, dialog antar agama, serta tanggung jawab sosial dan lingkungan. Sekolah di Norwegia sangat dipengaruhi oleh ideologi yang terkait dengan prinsip-prinsip pengajaran dan pembelajaran kolektif dan hak yang sama dalam pendidikan. Hal ini sebagian merupakan dampak dari politik demokrasi sosial selama 50-60 tahun, yang bertujuan untuk pemerataan sosial dan ekonomi, termasuk akses yang sama ke posisi apa pun dalam masyarakat tanpa

memandang latar belakang sosial ekonomi seseorang (Braathe & Otterstad, 2014).

Sekolah-sekolah di Norwegia sangat dipengaruhi oleh ideologi yang menekankan prinsip-prinsip pengajaran dan pembelajaran kolektif serta hak yang sama dalam pendidikan. Nilai-nilai ini mencerminkan komitmen untuk menciptakan sistem pendidikan yang inklusif, di mana semua siswa, terlepas dari latar belakang mereka, memiliki kesempatan yang sama untuk sukses. Konsep pendidikan yang setara dan inklusif ini sebagian besar merupakan hasil dari politik demokrasi sosial yang telah berlangsung selama lebih dari setengah abad di Norwegia. Selama 50-60 tahun terakhir, kebijakan demokrasi sosial di negara ini telah difokuskan pada pemerataan sosial dan ekonomi, termasuk memastikan akses yang sama ke pendidikan berkualitas dan kesempatan yang setara untuk meraih posisi apapun dalam masyarakat (Primary, n.d.). Hal ini juga mencakup upaya untuk mengurangi kesenjangan pendidikan antar kelompok sosial.

Selain itu, integrasi prinsip kewarganegaraan global dalam pendidikan Norwegia mencerminkan upaya negara untuk membentuk masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan. Dengan menanamkan kesadaran tentang isu-isu seperti perubahan iklim, hak asasi manusia,

dan keadilan sosial sejak dini, siswa diharapkan dapat tumbuh menjadi individu yang tidak hanya mengutamakan kesuksesan pribadi, tetapi juga berkomitmen untuk memberikan kontribusi positif bagi komunitas mereka dan dunia secara keseluruhan. Pendekatan ini memperkuat keterkaitan antara pendidikan dan pembangunan berkelanjutan, di mana siswa dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan abad ke-21. Dalam jangka panjang, hal ini tidak hanya memperkuat posisi Norwegia sebagai negara dengan sistem pendidikan yang progresif, tetapi juga membangun fondasi bagi generasi mendatang yang siap menghadapi perubahan global secara bijaksana dan bertanggung jawab.

Dalam kurikulum nasional, nilai-nilai global diintegrasikan ke dalam berbagai mata pelajaran, termasuk ilmu sosial, geografi, dan sejarah (Vermeer, 2008). Pendekatan *interdisipliner* ini memungkinkan siswa untuk memahami masalah-masalah global dari berbagai perspektif dan meresponsnya dengan tindakan yang relevan di tingkat lokal maupun global. Pemerintah Norwegia memberikan kesetaraan kepada seluruh warga negara secara global untuk mendapatkan kualitas dalam dunia pendidikan (Evans, 2008). Pemerintah

tersebut juga memberikan bantuan baik kepada guru – guru dalam konteks penelitian, kebijakan, kurikulum, atau pengajaran dan pembelajaran. Alih-alih diartikulasikan secara langsung, wacana tersebut sering kali tetap tersirat dan diasumsikan. Norwegia sangat dipengaruhi oleh wacana ini, yang menekankan kesetaraan dan kualitas sebagai hasil yang bernilai dalam pendidikan guru (Braathe & Otterstad, 2014).

Namun, meskipun pendidikan kewarganegaraan global di Norwegia memiliki banyak keunggulan, tantangan dalam implementasinya tetap ada. Salah satu tantangan utama adalah bagaimana cara mengajarkan nilai-nilai global tanpa melunturkan identitas lokal dan nasional. Guru dihadapkan pada tugas untuk menyeimbangkan antara penanaman kesadaran global dengan tetap mempertahankan nilai-nilai budaya dan tradisi Norwegia (Adolph, 2016). Oleh karena itu, pelatihan guru menjadi faktor penting dalam memastikan keberhasilan pendidikan kewarganegaraan global. Guru-guru perlu dipersiapkan untuk mengajarkan isu-isu global dengan cara yang menarik, relevan, dan peka terhadap perbedaan budaya. Pendidikan global adalah pendidikan yang membuka mata dan pikiran orang terhadap realitas dunia dan membangunkan mereka untuk mewujudkan dunia yang lebih adil, setara,

dan hak asasi manusia bagi semua (Lopes Sampaio Francisco Jaguaribe et al., 2022). Selain itu, Pendidikan untuk Keberlanjutan menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia dengan perlindungan lingkungan. Siswa diajarkan untuk mengapresiasi nilai-nilai keberlanjutan dan memahami dampak perilaku manusia terhadap bumi. Ini termasuk topik seperti perubahan iklim, penggunaan sumber daya alam yang bertanggung jawab, dan praktik-praktik ramah lingkungan yang dapat membantu menjaga kesejahteraan generasi mendatang. Pendidikan ini mendorong siswa untuk mengadopsi gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan mendukung kebijakan serta inisiatif yang melindungi lingkungan. Dengan pendekatan ini, Pendidikan Global membantu membangun kesadaran akan tanggung jawab bersama dalam menghadapi krisis lingkungan yang sedang dihadapi dunia saat ini (Change et al., 1995).

Pendidikan Perdamaian dan Pencegahan Konflik merupakan bagian penting dari Pendidikan Global, yang bertujuan mengajarkan penyelesaian perbedaan melalui dialog, bukan kekerasan, serta keterampilan seperti negosiasi dan resolusi konflik. Pendidikan antarbudaya mendukung pemahaman dan apresiasi berbagai budaya untuk membangun masyarakat inklusif. Semua

aspek ini bertujuan menyiapkan siswa sebagai warga dunia yang kritis dan bertanggung jawab. Di Norwegia, pendidikan menekankan fleksibilitas dan pendekatan holistik, mencakup pengembangan keterampilan akademis, sosial, dan emosional, serta memberikan ruang bagi siswa untuk belajar sesuai kebutuhan dan minat mereka.

Selain itu, tantangan lainnya adalah bagaimana cara mengukur dampak pendidikan kewarganegaraan global terhadap siswa. Pendidikan ini tidak hanya mengajarkan pengetahuan kognitif, tetapi juga mengembangkan sikap dan keterampilan sosial, yang sulit diukur melalui tes standar (Krumsvik, 2008). Oleh karena itu, evaluasi program-program ini seringkali mengandalkan pendekatan kualitatif yang menilai perubahan sikap, nilai, dan perilaku siswa. Di Norwegia, berbagai inisiatif telah dilakukan untuk mengevaluasi dampak dari pendidikan kewarganegaraan global, termasuk melalui penelitian yang melibatkan guru dan siswa. Semua prinsip dalam konstitusi dan yang dibangun di sekitarnya berlaku untuk semua bidang masyarakat, termasuk pendidikan (Klingstedt, 2003).

Konteks sosial-politik Norwegia yang damai dan inklusif juga memberikan dukungan kuat bagi pelaksanaan pendidikan kewarganegaraan global. Negara ini memiliki komitmen yang tinggi

terhadap perdamaian dunia, yang tercermin dalam perannya sebagai mediator konflik internasional dan pendukung utama organisasi-organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) (Sommer-lilleenget, 2020). Dukungan dari pemerintah dan masyarakat terhadap nilai-nilai global seperti hak asasi manusia dan keberlanjutan memberikan landasan yang kuat bagi keberhasilan pendidikan kewarganegaraan global di Norwegia.

Di sektor pendidikan kewarganegaraan global di Norwegia juga dipengaruhi oleh dinamika global yang terus berubah, seperti meningkatnya ketegangan politik internasional, arus migrasi, dan ancaman terhadap keberlanjutan lingkungan. Oleh karena itu, pendidikan ini perlu terus berkembang untuk menanggapi perubahan-perubahan ini dan memastikan bahwa generasi muda Norwegia dipersiapkan dengan baik untuk menghadapi masa depan yang tidak menentu. Dalam hal ini, Norwegia juga berkolaborasi dengan negara-negara lain dan lembaga internasional untuk berbagi praktik terbaik dan memperkuat pendekatan global terhadap pendidikan.

Potret ekstensif pendidikan kewarganegaraan global di Norwegia di atas memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana sebuah negara progresif dapat merespons tantangan global melalui pendidikan (Eds, 2012). Dengan integrasi

yang kuat antara nilai-nilai global dan pendidikan nasional, Norwegia menjadi contoh yang patut ditiru dalam mempersiapkan generasi yang lebih sadar, bertanggung jawab, dan berkomitmen untuk mewujudkan dunia yang lebih baik (*Addressing the Challenges in Higher Education*, 2016). Pandangan ini dapat menjadi inspirasi bagi negara-negara lain dalam merancang dan mengimplementasikan pendidikan kewarganegaraan global di konteks masing-masing. Menurut Kementerian Pendidikan dan Penelitian Norwegia, kurikulum mata pelajaran baru harus menjadi lebih sederhana, lebih jelas, dan lebih mengikat, dan harus berisi 'target pembelajaran yang berbeda untuk setiap mata pelajaran yang menggambarkan kompetensi yang diinginkan' (Elde Mølstad & Karseth, 2016).

Norwegia adalah model bagi negara-negara lain – negara yang sukses, kaya, dan ‘berbudi luhur’ dengan sistem politik yang stabil. Mayoritas orang Norwegia sangat bangga dengan negara mereka dan menganggap budaya Norwegia lebih unggul daripada budaya negara lain (Lile, 2019).

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah studi literatur, yang bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami secara mendalam tujuan

*Global Citizenship Education* (GCE) di Norwegia. Metode ini dipilih untuk menganalisis berbagai literatur akademik, kebijakan pendidikan, dan publikasi dari organisasi internasional yang relevan dengan GCE. Melalui studi literatur, penelitian ini dapat mengidentifikasi bagaimana konsep GCE diterapkan di konteks pendidikan Norwegia dan bagaimana tujuan-tujuannya direfleksikan dalam kebijakan pendidikan dan praktik pengajaran (Rukminingsih, Adnan, and Latief 2020).

Sumber data utama dalam penelitian ini mencakup jurnal ilmiah yang membahas GCE, buku yang menjelaskan teori pendidikan global, serta dokumen kebijakan pendidikan Norwegia seperti kurikulum nasional dan laporan implementasi. Selain itu, laporan dari organisasi internasional seperti UNESCO dan OECD yang membahas pendidikan global juga dianalisis untuk memperoleh perspektif yang lebih luas. Dengan menggabungkan berbagai sumber data ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai potret ekstensif tujuan GCE di Norwegia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **a.Penerapan Pendidikan Kewarganegaraan Global di Norwegia**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Norwegia memiliki komitmen kuat

terhadap pendidikan kewarganegaraan global (PKG). Penerapan PKG di Norwegia didasarkan pada kebijakan pendidikan nasional yang mengintegrasikan nilai-nilai global dalam kurikulum sekolah, mulai dari tingkat dasar hingga menengah.

Di Norwegia, pendidikan kewarganegaraan global tidak hanya diajarkan sebagai mata pelajaran khusus, tetapi juga diintegrasikan ke dalam berbagai mata pelajaran lainnya seperti ilmu sosial, geografi, dan bahasa asing. Pendekatan lintas disiplin ini memungkinkan siswa untuk memahami masalah global dari berbagai perspektif, menghubungkan isu-isu global dengan kehidupan sehari-hari mereka (Lopes Sampaio Francisco Jaguaribe et al., 2022). Hal ini memungkinkan mereka untuk melihat keterkaitan antara isu-isu global dan disiplin ilmu yang berbeda, sehingga memperkaya pemahaman mereka tentang bagaimana setiap masalah memiliki dampak yang luas dan saling terkait.

Dengan mengaitkan pendidikan kewarganegaraan global ke dalam mata pelajaran lain, siswa tidak hanya mendapatkan pengetahuan teoretis, tetapi juga belajar mengaplikasikan wawasan mereka dalam kehidupan nyata (Andreotti, 2015). Misalnya, dalam pelajaran geografi, mereka dapat membahas dampak perubahan iklim terhadap komunitas di

berbagai belahan dunia, sementara dalam kelas bahasa asing, mereka dapat memahami bagaimana bahasa dan budaya berperan dalam komunikasi global. Pendekatan ini membantu membangun kesadaran kritis siswa, meningkatkan empati, dan mempersiapkan mereka untuk berkontribusi secara positif dalam masyarakat global yang semakin kompleks.

Pendekatan pendidikan ini juga bertujuan untuk membangun kesadaran kritis dan empati siswa, yang sangat penting dalam era globalisasi saat ini. Dengan memahami isu-isu global yang beragam dan saling terkait, siswa dipersiapkan untuk menjadi warga dunia yang berdaya dan bertanggung jawab. Mereka didorong untuk tidak hanya terlibat dalam diskusi tentang masalah-masalah global, tetapi juga mengambil tindakan konkret untuk membuat perubahan positif. Dengan demikian, pendidikan kewarganegaraan global di Norwegia tidak hanya berfokus pada peningkatan pengetahuan akademis, tetapi juga membentuk karakter siswa agar siap berkontribusi dalam membangun masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan.

Menurut Kementerian Pendidikan dan Penelitian Norwegia, kurikulum mata pelajaran baru harus menjadi lebih sederhana, lebih jelas, dan lebih mengikat,

dan harus berisi 'target pembelajaran yang berbeda untuk setiap mata pelajaran yang menggambarkan kompetensi yang diinginkan' (Elde Mølstad & Karseth, 2016). Tujuan dari penyederhanaan ini adalah untuk memudahkan siswa dan guru dalam memahami tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, serta memastikan bahwa fokus utama tetap pada pengembangan kompetensi siswa. Dengan menyederhanakan kurikulum, pemerintah berupaya mengurangi beban administratif dan memastikan bahwa waktu pengajaran digunakan secara efektif untuk mendalami konsep-konsep penting, alih-alih hanya mengikuti daftar panjang materi yang harus diselesaikan.

Selain itu, kurikulum yang lebih jelas bertujuan untuk memberikan arahan yang lebih spesifik bagi para guru mengenai target pembelajaran yang harus dicapai di setiap mata pelajaran. Hal ini termasuk penjabaran 'target pembelajaran yang berbeda untuk setiap mata pelajaran yang menggambarkan kompetensi yang diinginkan'. Dengan penjelasan yang lebih rinci ini, diharapkan siswa dapat memahami dengan lebih baik kompetensi apa yang mereka perlukan dan bagaimana cara mencapainya. Hal ini juga membantu guru dalam merancang strategi pengajaran yang lebih efektif dan terfokus, yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi setiap siswa.

Analisis mengungkapkan bahwa, meskipun pesan dalam dokumen kebijakan mengungkapkan harapan untuk memperkuat dimensi pengetahuan dalam mata pelajaran sekolah, analisis kerangka kurikulum mata pelajaran baru menunjukkan bahwa ia lebih jelas menetapkan keterampilan, metode, dan strategi daripada konten pengetahuan khusus untuk diajarkan (Hilt & Riese, 2022).

Selain itu, penelitian menemukan bahwa guru di Norwegia dilatih untuk menerapkan pendekatan berbasis proyek dan diskusi terbuka, yang mendorong siswa untuk berpikir kritis tentang masalah global seperti hak asasi manusia, perubahan iklim, dan ketidaksetaraan sosial. Sekolah juga sering mengadakan kegiatan kolaboratif lintas budaya, seperti pertukaran pelajar dan kerja sama dengan sekolah-sekolah di negara lain, yang memperkuat pemahaman siswa tentang keragaman global.

### **b. Tantangan Implementasi Pendidikan Kewarganegaraan Global (PKG)**

Salah satu tantangan utama adalah kesenjangan dalam pemahaman dan penerapan konsep kewarganegaraan global di antaranya adalah kompetensi para guru (Braathe & Otterstad, 2014). Meskipun kebijakan pemerintah mendukung pengajaran PKG, tidak semua guru

memiliki pelatihan yang memadai untuk mengajarkan isu-isu global secara efektif. Beberapa guru merasa kurang percaya diri atau kurang siap menghadapi topik-topik global yang kompleks, seperti konflik internasional atau ketimpangan ekonomi global (Feser et al., 2023). Banyak guru yang tidak terbiasa dengan pendekatan lintas budaya atau tidak memiliki pengalaman dalam mendiskusikan topik-topik yang kompleks seperti perubahan iklim, konflik internasional, atau ketimpangan ekonomi global. Ketidaksiapan ini sering kali membuat mereka merasa kurang percaya diri dalam membawa isu-isu tersebut ke dalam ruang kelas dan mengaitkannya dengan kehidupan siswa.

Kurangnya pelatihan khusus mengenai PKG menyebabkan beberapa guru tidak memiliki strategi pengajaran yang sesuai untuk mengatasi berbagai sudut pandang dan perdebatan yang muncul terkait isu-isu global (Braathe & Otterstad, 2014). Mereka mungkin kesulitan dalam menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan terbuka, di mana siswa dapat berdiskusi secara kritis dan mempertimbangkan berbagai perspektif. Akibatnya, pengajaran PKG berisiko menjadi terlalu dangkal atau tidak konsisten, tergantung pada kemampuan dan latar belakang masing-masing guru. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan

upaya yang lebih sistematis untuk meningkatkan kompetensi guru melalui pelatihan berkelanjutan dan pengembangan sumber daya pendidikan yang mendukung pengajaran PKG, sehingga semua guru dapat merasa siap dan mampu memfasilitasi pembelajaran yang bermakna tentang isu-isu global.

Selain itu, terdapat tantangan dalam menyeimbangkan antara penanaman nilai-nilai global dengan mempertahankan identitas nasional dan lokal. Sementara kurikulum bertujuan untuk membentuk siswa yang memiliki pandangan global, beberapa pihak khawatir bahwa hal ini dapat melemahkan rasa kebangsaan dan identitas budaya lokal. Pemerintah dan sekolah-sekolah di Norwegia berupaya untuk menanggapi kekhawatiran ini dengan menyelaraskan pendidikan kewarganegaraan global dengan prinsip-prinsip nasional Norwegia yang menekankan kesetaraan, demokrasi, dan inklusivitas (Alstad & Sopanen, 2021).

Tantangan utama pendidikan kewarganegaraan global di Norwegia adalah kesenjangan dalam pemahaman dan kemampuan guru menerapkan konsep ini di kelas. Meski ada dukungan kebijakan, banyak guru kurang percaya diri dan tidak memiliki pelatihan memadai untuk mengajarkan isu global seperti perubahan iklim dan konflik internasional. Kurangnya sumber daya pelatihan memperburuk

kesiapan mereka dalam menyampaikan materi secara kritis dan kontekstual.

Ketidaksiapan guru dalam mengajarkan PKG berpotensi menyebabkan pembelajaran yang dangkal atau tidak konsisten di antara berbagai sekolah. Beberapa guru mungkin terjebak dalam menyampaikan informasi secara teoretis tanpa menghubungkannya dengan kehidupan sehari-hari siswa atau tantangan yang nyata dalam masyarakat global. Hal ini juga dapat menghambat diskusi kritis di dalam kelas dan mengurangi kesempatan siswa untuk mengembangkan pemikiran yang lebih mendalam dan perspektif yang luas tentang isu-isu global. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kualitas pendidikan kewarganegaraan global, diperlukan investasi yang lebih besar dalam program pelatihan guru yang berfokus pada PKG, serta penyediaan sumber daya pendidikan yang mendukung pendekatan lintas disiplin dan diskusi kritis tentang topik-topik global yang relevan (“Glob. Citizsh. Educ. Top. Learn. Object.” 2015).

Selanjutnya, tantangan lainnya adalah keterbatasan waktu dan sumber daya. Dalam beberapa kasus, sekolah merasa kesulitan untuk menyisihkan waktu di tengah beban kurikulum yang sudah padat. Menyediakan materi pengajaran yang sesuai dan memastikan guru memiliki sumber daya yang memadai juga menjadi tantangan tersendiri, terutama di sekolah-

sekolah yang berada di daerah pedesaan atau terpencil.

### c. Dampak Pendidikan Kewarganegaraan Global Terhadap Siswa

Penelitian ini juga mengeksplorasi dampak pendidikan kewarganegaraan global terhadap siswa di Norwegia. Secara umum, hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa Norwegia memiliki kesadaran yang lebih tinggi terhadap isu-isu global dibandingkan dengan siswa di beberapa negara lainnya. Mereka menunjukkan pemahaman yang baik tentang hak asasi manusia, lingkungan, serta keberagaman budaya (Primary, n.d.). Hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa Norwegia cenderung memiliki kesadaran yang lebih tinggi terhadap berbagai isu global dibandingkan dengan siswa di banyak negara lain. Mereka menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang konsep-konsep penting seperti hak asasi manusia, keberlanjutan lingkungan, dan keberagaman budaya. Pendidikan yang diterima mendorong mereka untuk berpikir kritis tentang tantangan-tantangan yang dihadapi dunia, seperti ketidaksetaraan sosial, perubahan iklim, dan konflik antarbangsa. Hal ini membuktikan bahwa integrasi pendidikan kewarganegaraan global ke dalam kurikulum berhasil membentuk siswa yang tidak hanya cerdas

secara akademis, tetapi juga memiliki kesadaran sosial dan tanggung jawab global.

Selain meningkatkan pemahaman mereka terhadap isu-isu global, pendidikan kewarganegaraan global juga berkontribusi pada pembentukan sikap yang lebih inklusif dan toleran di kalangan siswa Norwegia (Elkorghli & Bagley, 2023). Penelitian menunjukkan bahwa siswa yang terlibat dalam pendidikan kewarganegaraan global cenderung lebih menghargai keberagaman dan memiliki sikap terbuka terhadap berbagai latar belakang budaya. Mereka lebih siap untuk berpartisipasi dalam diskusi yang melibatkan pandangan yang berbeda dan memiliki empati yang lebih besar terhadap orang lain, baik di tingkat lokal maupun global. Pendidikan ini juga memupuk kemampuan mereka untuk memandang masalah dari berbagai perspektif, sehingga memungkinkan mereka untuk mencari solusi yang lebih holistik dalam menghadapi tantangan dunia. Dengan demikian, dampak pendidikan kewarganegaraan global di Norwegia tidak hanya membekali siswa dengan pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter yang siap menghadapi kompleksitas dunia modern.

Siswa yang terlibat dalam program PKG cenderung memiliki sikap yang lebih toleran terhadap perbedaan budaya dan

lebih terbuka terhadap dialog antar bangsa. Mereka juga lebih sadar akan peran mereka dalam isu-isu global, seperti perubahan iklim dan ketidaksetaraan ekonomi, serta lebih termotivasi untuk mengambil tindakan, baik melalui proyek sekolah maupun aktivitas komunitas di luar sekolah (Ogden et al., 2010).

Siswa yang terlibat dalam program pendidikan kewarganegaraan global (PKG) di Norwegia menunjukkan sikap yang lebih toleran dan inklusif terhadap perbedaan budaya, serta memiliki pandangan yang lebih terbuka terhadap pentingnya dialog antar bangsa. Pendidikan PKG memberikan mereka pemahaman yang lebih baik tentang nilai-nilai keberagaman dan saling menghargai, sehingga membantu menciptakan lingkungan sekolah yang lebih harmonis dan menerima berbagai latar belakang (Bourn et al., 2017). Melalui kurikulum yang mencakup diskusi tentang isu-isu internasional dan lokal, siswa belajar untuk melihat perbedaan sebagai sumber kekuatan dan memahami bahwa kolaborasi lintas budaya adalah kunci untuk mengatasi banyak tantangan global. Hal ini tidak hanya memperkaya wawasan mereka, tetapi juga meningkatkan keterampilan komunikasi antarbudaya yang sangat penting di dunia yang semakin terhubung.

Selain sikap yang lebih inklusif, program PKG juga mendorong siswa untuk lebih sadar akan peran mereka dalam menghadapi isu-isu global, seperti perubahan iklim dan ketidaksetaraan ekonomi (Hilt & Riese, 2022). Mereka menjadi lebih memahami bagaimana tindakan individu dan komunitas dapat mempengaruhi dunia secara luas, sehingga muncul motivasi yang lebih besar untuk mengambil langkah nyata dalam membuat perubahan. Siswa sering kali terlibat dalam proyek sekolah yang berkaitan dengan keberlanjutan, seperti program daur ulang, kampanye kesadaran lingkungan, atau kegiatan amal yang mendukung kelompok rentan. Selain itu, dorongan untuk berkontribusi juga meluas di luar sekolah, di mana mereka aktif terlibat dalam kegiatan komunitas, seperti sukarelawan di organisasi lingkungan atau partisipasi dalam gerakan sosial. Dengan demikian, pendidikan PKG tidak hanya mengembangkan pengetahuan teoretis siswa tentang isu-isu global, tetapi juga membentuk mereka menjadi individu yang proaktif dan bertanggung jawab dalam menghadapi tantangan dunia nyata.

Namun, penelitian juga mengungkap bahwa dampak PKG bervariasi tergantung pada konteks sosial siswa. Siswa yang tinggal di daerah yang lebih multikultural, misalnya, cenderung memiliki pemahaman yang lebih

mendalam tentang keberagaman dibandingkan dengan siswa yang tumbuh di lingkungan yang homogen. Ini menunjukkan pentingnya memberikan pengalaman belajar yang beragam untuk semua siswa, sehingga mereka dapat lebih siap untuk berpartisipasi dalam masyarakat global yang semakin saling terhubung.

#### **d. Strategi Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Global di Masa Depan**

Untuk mengatasi tantangan dan memperkuat pendidikan kewarganegaraan global di Norwegia, penelitian ini mengidentifikasi beberapa strategi kunci yang dapat diterapkan.

Pertama, perlu ada peningkatan dalam pelatihan guru. Guru perlu diperlengkapi dengan pemahaman mendalam tentang isu-isu global dan bagaimana cara mengajarkannya kepada siswa dengan cara yang relevan dan menarik. Program pelatihan yang berkelanjutan, baik melalui pendidikan formal maupun pelatihan profesi, harus diberikan kepada para pendidik untuk memastikan bahwa mereka dapat mengajarkan PKG secara efektif (Elstad, 2023).

Guru perlu memahami isu global seperti perubahan iklim, hak asasi manusia, dan ketidaksetaraan sosial secara mendalam agar dapat mengajarkan materi

dengan relevan dan kontekstual. Pelatihan guru harus bersifat lintas disiplin dan berkelanjutan, mencakup pendidikan formal seperti program magister atau sertifikasi, serta pelatihan profesi melalui lokakarya dan seminar. Pendekatan inovatif, seperti teknologi digital dan pembelajaran berbasis proyek, diperlukan agar materi lebih menarik dan mudah dipahami siswa, serta membantu guru merancang pembelajaran interaktif dan menantang.

Selain itu, dukungan berkelanjutan dari pemerintah dan institusi pendidikan diperlukan untuk memastikan bahwa pelatihan guru selalu mengikuti perkembangan terbaru terkait isu-isu global dan metode pengajaran yang efektif. Kurikulum pelatihan harus selalu diperbarui sesuai dengan perubahan dalam dunia global yang dinamis, seperti perkembangan dalam teknologi atau munculnya isu-isu baru yang memerlukan perhatian khusus. Peningkatan kolaborasi antara sekolah, universitas, dan lembaga pelatihan juga penting untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang mendukung pengembangan kompetensi guru secara holistik. Dengan adanya dukungan yang memadai, guru dapat menjadi agen perubahan yang lebih efektif, mampu mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan global secara kritis dan bertanggung jawab.

Kedua, penting untuk terus memperbarui kurikulum dengan mengikuti perkembangan isu global yang dinamis (Braathe & Otterstad, 2014). Dunia global berubah dengan cepat, dan isu-isu baru seperti keamanan siber, migrasi, atau pandemi global mungkin tidak ada dalam kurikulum sebelumnya (Bourn et al., 2017). Oleh karena itu, kurikulum harus tetap fleksibel dan responsif terhadap perkembangan ini.

Isu-isu tersebut mungkin belum tercakup secara memadai dalam kurikulum sebelumnya, sehingga pembaruan kurikulum menjadi langkah krusial untuk memastikan bahwa siswa dapat mempelajari dan memahami topik-topik terbaru yang mempengaruhi masyarakat global. Dengan menyesuaikan kurikulum sesuai dengan tren dan tantangan baru, siswa dapat memperoleh wawasan yang lebih luas dan lebih siap dalam menghadapi perubahan dunia yang tidak menentu. Selain itu, pembaruan kurikulum harus dilakukan dengan mempertimbangkan fleksibilitas dan responsivitas terhadap perkembangan terkini. Kurikulum yang fleksibel memungkinkan penyesuaian yang cepat ketika isu-isu global mengalami perubahan signifikan, misalnya, munculnya teknologi baru yang memengaruhi kehidupan sehari-hari atau perubahan kebijakan internasional yang berdampak luas. Responsivitas terhadap

perkembangan ini dapat diwujudkan melalui peninjauan kurikulum secara berkala, kolaborasi dengan para ahli di berbagai bidang, serta masukan dari pendidik dan siswa yang langsung berinteraksi dengan materi pembelajaran. Dengan pendekatan ini, kurikulum dapat mencerminkan realitas dunia saat ini dan mempersiapkan siswa dengan pengetahuan serta keterampilan yang relevan untuk menjadi warga global yang kompeten, kritis, dan adaptif dalam menghadapi tantangan masa depan.

Ketiga, penguatan kerja sama internasional dalam pendidikan juga merupakan kunci keberhasilan. Norwegia dapat memperluas kerja sama dengan negara lain dalam program pertukaran siswa, pelatihan guru internasional, serta inisiatif pendidikan bersama (Elstad, 2023). Kolaborasi ini tidak hanya memperkaya pengalaman belajar siswa, tetapi juga memperkuat pemahaman lintas budaya yang menjadi inti dari pendidikan kewarganegaraan global.

Berinteraksi dengan siswa dari berbagai latar belakang membantu mengembangkan empati dan pemahaman tentang isu global. Selain program pertukaran siswa, Norwegia dapat meningkatkan kerja sama dalam pelatihan guru internasional melalui lokakarya, seminar, dan kursus online. Guru dapat belajar dari praktik di negara lain,

memperoleh wawasan baru, dan menerapkannya di kelas. Kerja sama ini juga membentuk komunitas pembelajaran yang mendukung, memungkinkan guru berkolaborasi, bertukar ide, dan membahas tantangan dalam mengajarkan isu global. Inisiatif pendidikan bersama, seperti proyek penelitian internasional atau program pendidikan berbasis komunitas, juga dapat menjadi sarana penting untuk memperkuat pemahaman lintas budaya yang menjadi inti dari PKG (Klingstedt, 2003). Dengan bekerja sama dalam proyek yang memiliki dampak nyata, siswa dapat melihat bagaimana kolaborasi internasional dapat menghasilkan solusi yang lebih baik untuk tantangan global. Selain itu, pengalaman ini akan membantu mereka untuk lebih memahami konteks lokal dan global secara bersamaan, memperkaya perspektif mereka dalam melihat isu-isu yang kompleks. Dengan demikian, penguatan kerja sama internasional dalam pendidikan akan berkontribusi tidak hanya pada kualitas pendidikan kewarganegaraan global di Norwegia, tetapi juga pada pembentukan generasi siswa yang lebih berwawasan global, toleran, dan siap menghadapi tantangan masa depan.

Keempat, evaluasi yang lebih komprehensif perlu dilakukan untuk mengukur dampak dari pendidikan kewarganegaraan global (Elstad, 2023).

Penelitian yang berkelanjutan tentang sikap, pengetahuan, dan keterlibatan siswa dalam isu-isu global dapat memberikan wawasan yang lebih baik tentang efektivitas program PKG dan membantu merancang intervensi yang lebih tepat di masa depan. Dengan pengumpulan data yang sistematis, pendidikan dapat lebih memahami bagaimana program ini memengaruhi pemikiran kritis siswa serta kemampuan mereka untuk berkontribusi dalam diskusi global. Evaluasi yang menyeluruh tidak hanya berfokus pada hasil akademis, tetapi juga pada perubahan sikap dan perilaku siswa terhadap masalah-masalah yang relevan, seperti keberagaman, keberlanjutan, dan keadilan sosial.

Selanjutnya, hasil dari evaluasi ini dapat membantu dalam merancang intervensi yang lebih tepat dan berbasis data di masa depan. Dengan mengidentifikasi aspek-aspek dari program PKG yang berhasil dan yang perlu ditingkatkan, pendidik dan pembuat kebijakan dapat mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan pembelajaran siswa. Misalnya, jika evaluasi menunjukkan bahwa siswa mengalami kesulitan dalam memahami konsep-konsep tertentu, maka pengembangan materi ajar atau metode pengajaran yang lebih sesuai dapat dilakukan. Selain itu, evaluasi yang

komprehensif juga bisa memberikan masukan berharga untuk pelatihan guru, memastikan bahwa mereka dibekali dengan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk menyampaikan materi dengan baik.

Evaluasi yang dilakukan secara berkala dapat menciptakan budaya refleksi dalam sistem pendidikan, di mana guru, siswa, dan pemangku kepentingan lainnya terlibat dalam proses peningkatan berkelanjutan. Dengan melibatkan siswa dalam evaluasi, mereka juga dapat merasakan peran aktif dalam proses pembelajaran mereka sendiri, serta memberikan perspektif yang berbeda tentang pengalaman mereka dalam program PKG. Hal ini akan memperkuat rasa kepemilikan dan tanggung jawab mereka terhadap isu-isu global, sehingga menciptakan generasi yang tidak hanya terdidik tetapi juga terlibat aktif dalam menciptakan perubahan positif di dunia. Dengan demikian, evaluasi yang lebih komprehensif menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa pendidikan kewarganegaraan global dapat berkontribusi secara signifikan terhadap pembentukan warga global yang kritis, sadar, dan bertanggung jawab.

Pendidikan kewarganegaraan global di Norwegia diharapkan dapat terus berkembang dan berkontribusi positif terhadap pembentukan warga dunia yang

berpikiran terbuka, kritis, dan aktif dalam mewujudkan masyarakat yang lebih adil dan damai.

## **SIMPULAN**

Potret ekstensif tujuan pendidikan kewarganegaraan global di Norwegia menunjukkan bahwa negara ini telah berhasil mengintegrasikan nilai-nilai global seperti hak asasi manusia, keberagaman budaya, dan keberlanjutan ke dalam sistem pendidikannya. Melalui pendekatan lintas disiplin dan metode pengajaran yang interaktif, siswa Norwegia dipersiapkan untuk memahami dan berpartisipasi dalam mengatasi isu-isu global dengan sikap yang lebih toleran dan kritis.

Namun, potret ekstensif ini juga menyoroti tantangan dalam implementasi, seperti perlunya peningkatan pelatihan guru, penyeimbangan nilai global dengan identitas lokal, dan keterbatasan sumber daya di beberapa sekolah. Untuk memperkuat dampak tujuan pendidikan kewarganegaraan global, Norwegia perlu terus mengembangkan pelatihan guru yang lebih komprehensif, memperbarui kurikulum, serta melakukan evaluasi berkelanjutan terhadap program tersebut.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Addressing the challenges in higher education. (2016). 1285, 53–90.  
[https://doi.org/10.1787/eco\\_surveys-nor-2016-6-en](https://doi.org/10.1787/eco_surveys-nor-2016-6-en)
- Adolph, R. (2016). *済無No Title No Title No Title*. 1–23.
- Alstad, G. T., & Sopanen, P. (2021). Language orientations in early childhood education policy in Finland and Norway. *Nordic Journal of Studies in Educational Policy*, 7(1), 30–43.  
<https://doi.org/10.1080/20020317.2020.1862951>
- Andreotti, V. D. O. (2015). Please refer to the book for correct pagination when citing. *Global citizenship education otherwise: pedagogical and theoretical insights*. 1–8.
- Bourn, D., Hunt, F., & Bamber, P. (2017). *A Review of education for sustainable development and global citizenship education in teacher education. Background paper prepared for the 2017/8 Global Education Monitoring Report, Accountability in education: Meeting our commitments*. 1–66.  
<http://unesdoc.unesco.org/images/0025/002595/259566e.pdf>
- Braathe, H. J., & Otterstad, A. M. (2014). Education for All in Norway: Unpacking Quality and Equity. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 116(1877), 1193–1200.  
<https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.01.368>
- Change, E., Education, E. S., Countries, F., Education, N., & Attitudes, S. (1995). *Document resume*.
- Eds, J. D. G. (2012). *NORWAY by Nina Volckmar*. 2.
- Education, C. (2023). *The Good Global Citizen for Sustainability Transformations*. May.
- Elde Mølstad, C., & Karseth, B. (2016). National curricula in Norway and Finland: The role of learning outcomes. *European Educational Research Journal*, 15(3), 329–344.  
<https://doi.org/10.1177/1474904116639311>
- Elkorghli, E. A. B., & Bagley, S. S. (2023). Cognitive mapping of critical global citizenship education: Conversations with teacher educators in Norway. *Prospects*, 53(3–4), 371–388.  
<https://doi.org/10.1007/s11125-022-09624-7>
- Elstad, E. (2023). Evaluating Education: Normative Systems and Institutional Practices Teacher Education in the Nordic Region Challenges and Opportunities. In *Teacher education in the Nordic region: Challenges and opportunities*.
- Evans, C. (2008). Religious education in public schools: An international human rights perspective. *Human Rights Law Review*, 8(3), 449–473.  
<https://doi.org/10.1093/hrlr/ngn020>
- Feser, M. S., Haak, I., & Rabe, T. (2023). *VeSP-Be – Vergleich von Studieneingangphasen in Physik hinsichtlich des Sense of Belonging von Studierenden. Dokumentation der Erhebungsinstrumente und deren deskriptive, quantitative Ergebnisse*. 9. <https://doi.org/10.25656/01>
- Global citizenship education: topics and learning objectives. (2015). In *Global citizenship education: topics and learning objectives*.  
<https://doi.org/10.54675/drhc3544>
- Grete Broderstad, E. (2022). Sámi education between law and politics – The Sámi-Norwegian context. *Indigenising Education and Citizenship*, 53–73.  
<https://doi.org/10.18261/9788215053417-2022-04>
- Hilt, L., & Riese, H. (2022). Hybrid forms

- of education in Norway: a systems theoretical approach to understanding curriculum change. *Journal of Curriculum Studies*, 54(2), 223–242. <https://doi.org/10.1080/00220272.2021.1956596>
- Klingstedt, S. (2003). Equality in Education and its application by the court: Norway. *European Journal for Education Law and Policy*, 5(1/2), 127–131. <https://doi.org/10.1023/b:eelp.0000006741.33477.70>
- Krumsvik, R. J. (2008). The view of knowledge and the new national curriculum in Norway. *US-China Education Review*, 5(7), 13–28. <http://www.teacher.org.cn/doc/ucedu200807/ucedu20080702.pdf>
- Lile, H. S. (2019). The Realisation of Human Rights Education in Norway. *Nordic Journal of Human Rights*, 37(2), 143–161. <https://doi.org/10.1080/18918131.2019.1674007>
- Lopes Sampaio Francisco Jaguaribe, S., Calvo Salvador, A., & Rodríguez Hoyos, C. (2022). Edited by the Academic Network on Global Education & Learning. *Development Education Research Centre*, 1–196.
- Ogden, T., Ulvestad Kärkl, F., & Stegenborg Teigen, K. (2010). Linking research, policy and practice in welfare services and education in Norway. *Evidence and Policy*, 6(2), 161–177. <https://doi.org/10.1332/174426410X502293>
- Østerud, Ø., & Selle, P. (2006). Power and democracy in Norway: The transformation of Norwegian politics. *Scandinavian Political Studies*, 29(1), 25–46. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9477.2006.00140.x>
- Oxley, L., & Morris, P. (2013). Global Citizenship: A Typology for Distinguishing its Multiple Conceptions. *British Journal of Educational Studies*, 61(3), 301–325. <https://doi.org/10.1080/00071005.2013.798393>. *Journal of Social Science Education*, 19(4), 98–113. <https://doi.org/10.4119/jsse-3466>
- Primary, F. O. R. (n.d.). Curriculum for Primary , Secondary and Adult Education in Norway the Royal Ministry of Education ,. *Adult Education*.
- Rachmahana, R. S. (2008). Psikologi Humanistik dan Aplikasinya dalam Pendidikan [Humanistic Psychology and Its Applications in Education]. *El-Tarawwi: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(1), 99–114.
- Sassi, K., & Azzahra, H. (2024). *A Comparative Study Of The Complexity Of Sacred Values Of The World ' S Religions : A Multidisciplinary Perspective*. September. <https://doi.org/10.15408/iu.v10i2.39082>
- Schulz, W., Ainley, J., Fraillon, J., Losito, B., Agrusti, G., Damiani, V., & Friedman, T. (2022). *Education for citizenship in times of global challenge: IEA International Civic and Citizenship Education Study 2022 International Report*. 1–145.
- Sommer-lilleengen, A. (2020). *Starting to dance Master ' s thesis*. November.
- Urry, J. (1999). Globalization and Citizenship. *Journal of World-Systems Research*, 310–324. <https://doi.org/10.5195/jwsr.1999.137>
- Vermeer, P. (2008). Religion and education in Europe. Developments, contexts and debates. *Journal of Empirical Theology*, 21(2), 252–253. <https://doi.org/10.1163/157092508x343940>